



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NOER AMALIS SHOLEHA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **846169**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.185.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BANGKALAN, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 338.000.000

1. MOBIL, AVANZA TYPE-G Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, HONDA X1B02N04L0 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, SUZUKI FU 150SCD3 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. MOTOR, HONDA H5C02R20M1 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
5. MOBIL, HONDA MOBILIO TYPE-E Tahun 2015, WARISAN Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 61.640.303



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.597.640.303
III. HUTANG	Rp.	311.799.984
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.285.840.319

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.